

## KOMUNISME DALAM PERGUMULAN WACANA IDEOLOGI MASYUMI

Oleh: Samsuri ✓

### Abstract

*This article explores the relationship between Islam and communism in Indonesia, which could be learnt from the political-ideological struggle of Masyumi and PKI (Indonesian Communist Party) in the parliamentary democracy era. The ideological discourse of Masyumi on the Communism was supported by ideological setting when its establishment in the revolution nature and the politic ideological competition after the proclamation of independence on August 17, 1945, and the international situation of the Cold War. The nature of ideological setting was translated in the explaining system such as ideological interpretation of Islam by comparing Islamic superiority over capitalism and communism; religious-socialism and Marxian-socialism issues; and the fatwa (legal decisions) of anti-communism that crystallized in the Masyumi factions when they faced the communism issues.*

### الخلاصة

إن هذه المقالة تبحث المقارنة بين الحزب الإسلامي و الحزب الشيوعي في إندونيسيا. وهي تحلل المسألة من جهة الكفاح السياسي المذهبي والحزب الشيوعي الإندونيسي في زمن الديمقراطية البرلمانية. الفرق المذهبي بين ماشومي و الحزب الشيوعي الإندونيسي صدقها الحالة المذهبية عند نهضتها في الثورة والمباراة المذهبية السياسية بعد الإشهار الإستقلالي في التاريخ ١٧ من أغسطس سنة ١٩٤٥ والحالة العالمية عند الحرب البارد. إن الحالة المذهبية تترجم في البحث مثل التفسير المذهبي عند الإسلام بطريقة المقارنة بين قوة الإسلام نحو الرأسمالية والشيوعية، الإشتراكية الدينية و ماركسية.

## A. Pendahuluan

Pergumulan Islam dan Komunisme di Indonesia telah mewarnai perjalanan sejarah modern bangsa ini. Sejak komunisme mulai berkembang pada sekitar 1916-1920 hubungan lama yang menyejarah antara Islam dan Komunisme, baik di masa revolusi fisik ataupun di periode sesudahnya, telah banyak menyita perhatian kajian banyak akademisi.<sup>1</sup>

Di masa sekarang, polemik pro-kontra terutama di kalangan Islam tentang komunisme menjadi daya tarik tersendiri untuk dikaji di era pasca Perang Dingin.<sup>2</sup> Pro-kontra tersebut diperkuat setelah di lima tempat yang berbeda Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan permohonan maaf pada awal 2000 terhadap orang-orang yang menjadi korban penumpasan peristiwa G30S/PKI, serta usulan agar larangan terhadap ajaran Komunisme yang tercantum di dalam Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 dicabut.<sup>3</sup>

Ketetapan (Tap) MPRS No. XXV/MPRS/1966 memuat pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Ada dua alasan PKI dan paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang. Pertama, paham komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan bertentangan dengan Pancasila, terutama jika dihubungkan dengan sila kesatu Pancasila. Kedua, orang-orang dan golongan penganut paham tersebut, khususnya PKI pada 1948 dan 1965, dikatakan telah beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan.<sup>4</sup> Sikap pro-kontra di kalangan Islam terhadap Komunisme sebenarnya dapat dipelajari kembali dari perjalanan politik di Indonesia pasca-kemerdekaan hingga akhir era demokrasi liberal (1957). Selama era demokrasi liberal

<sup>1</sup> Kajian akademik hubungan antara Islam dan Komunisme di Indonesia ini antara lain, untuk menyebut beberapa nama, dapat dicermati dalam Timur Jaylani, 1959, *The Sarekat Islam Movement: Its Contribution to Indonesian Nationalism*, Tesis MA di Montreal: McGill University. H. J. Benda dan Ruth T. McVey (penyunting dan penerjemah), 1960, *The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents*, Cornell University Press, Ithaca. Deliar Noer, 1960, *Masjumi: Its Organization, Ideology, and Political Role in Indonesia*, Tesis MA di Cornell University, Ithaca. Arnold C. Brackman, 1963, *Indonesian Communism: A History*, Frederick A. Praeger, New York. Ruth T. McVey, 1965, *The Rise of Indonesian Communism*, Cornell University Press, Ithaca. Takashi Siraishi, 1997, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, alih bahasa Hilmar Farid Grafitti Press, Jakarta. Lihat juga Soe Hok Gie, 1999, *Di Bawah Lentera Merah: Riwat Sarekat Islam Semarang 1917-1920*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Pendapat pro dan kontra dapat dibaca antara lain dalam "Seputar Penghapusan Tap MPRS No XXV", *Suara Merdeka*, 8 April 2000, hal. XI.

<sup>3</sup> Permohonan maaf Presiden Abdurrahman Wahid tersebut disampaikan pada forum-forum: "Secangkir The Bersama Gus Dur" di TVRI, 14 Maret 2000; dialog dengan masyarakat usai shalat jumat di Masjid Al-Munawaroh, Ciganjur, 22 Maret 2000. Pertemuan dengan masyarakat Jawa Timur di Malang, 25 Maret 2000. Pembukaan Kongres PDI Perjuangan di Semarang, 27 Maret 2000. Dan tatap muka dengan masyarakat Kedung Ombo, 3 Mei 2000. Lihat juga Eriyanto, 2001, "Sikap Mendua pada Gus Dur," *Jurnal Pantau*, edisi 10, hal. 11.

<sup>4</sup> Lihat, *Keputusan 2 M.P.R.S. Sidang Umum ke-IV 20 Djuni - 6 Djuli 1966*, U.P. Indonesia, Yogyakarta, hal.

tersebut terdapat pergumulan penting yang dilakukan oleh kelompok Muslim dengan kelompok komunis (selain dengan sosialis ataupun nasionalis).

Sistem kepartaian yang mendukung kehidupan demokrasi liberal mendapatkan ruang gerak setelah Maklumat Pemerintah yang ditandatangani Wakil Presiden Republik Indonesia Mohammad Hatta, dikeluarkan pada 3 November 1945, tentang pembentukan partai-partai di Indonesia. Melalui maklumat itulah lahir partai-partai politik yang mewakili berbagai aliran ideologi-politik yang tumbuh di masyarakat.<sup>5</sup>

Bagi umat Islam, maklumat tersebut merupakan peluang untuk membentuk partai politik Islam. Kemudian dibentuklah Partai Masyumi yang direncanakan sebagai satu-satunya partai politik Islam berdasarkan keputusan Kongres Umat Islam di Yogyakarta, 7-8 November 1945.<sup>6</sup>

Sebelumnya pernah berdiri Masyumi "buatan Jepang" pada bulan Oktober 1943.<sup>7</sup> Berbeda dengan Masyumi "buatan Jepang" yang oleh Pemerintah Pendudukan Jepang dijadikan alat untuk mengkooptasi umat Islam demi kepentingannya sendiri, Masyumi hasil Kongres Yogyakarta motif pembentukannya adalah untuk menjadikannya sebagai "partai politik tunggal" Islam yang dapat menyalurkan aspirasi politik umat.<sup>8</sup>

Suasana revolusi yang sedang bergolak di Indonesia pada awal-awal kemerdekaan, dan persaingan dengan berbagai kelompok ideologi — yaitu Nasionalisme dan Marxisme/Sosialisme dari partai-partai baru tersebut — telah mendorong tokoh-tokoh politik dan pergerakan sosial keagamaan Islam Indonesia yang telah aktif semenjak zaman pergerakan nasional untuk membentuk "partai tunggal" Islam di Indonesia. "Partai tunggal Islam" ini, yaitu Masyumi, akan menghimpun semua potensi kekuatan politik Islam. Dengan demikian, partai itu akan memiliki sifat pluralisme di dalamnya, tampak dari ragam aliran pemikiran keagamaan anggota-anggota Masyumi, seperti tercermin dalam susunan federatif keanggotaan istimewa yang terdiri atas organisasi sosial keagamaan, yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama

<sup>5</sup> Partai-partai tersebut antara lain: Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) berdiri 7 November 1945; PKI (Partai Komunis Indonesia) berdiri tanggal 7 November 1945, sebelumnya telah didirikan kembali pada 21 Oktober 1945; Partai Rakyat Jelata berdiri 8 November 1945; Partai Kristen Indonesia (Parkindo), berdiri 10 November 1945; Partai Sosial Indonesia, berdiri 10 November 1945; Partai Rakyat Sosialis, berdiri 20 November 1945; Partai Katolik Republik Indonesia, berdiri 8 November 1945; Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, berdiri 17 Desember 1945; dan PNI (Partai Nasional Indonesia), berdiri 29 Januari 1946 sebagai hasil fusi antara PRI (Partai Rakyat Indonesia), Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia), dan Serikat Rakyat Indonesia yang masing-masing berdiri pada bulan November dan Desember 1945. Lihat: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1985, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Jilid I, PT Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta, hal. 55-56. Lihat juga George McTurnan Kahin, 1952, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, hal. 156-161.

<sup>6</sup> Abu Barkat, 1951, "Peristiwa Penting Bagi Umat Islam Indonesia 17-8-1945 — 17-8-1951", *Suara Partai Masyumi*, No. 8-9, Th. Ke-6, Agustus-September, hal. 14 dan 16. Lihat juga Ahmad Syafii Maarif, 1985, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, LP3ES, Jakarta, hal. 110

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Yusril Inza Mahendra, 1999, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jam'at-i-Islam (Pakistan)*, Penerbit Paramadina, Jakarta, hal. 62.

(NU), Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI), Al-Irsyad, Jam'iyatul Wasliyah, Al-Ittihadiyah dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).<sup>9</sup>

Pandangan dasar modernisme Masyumi yang secara positif memandang pluralisme telah mendorong Masyumi untuk bersikap terbuka. Keterbukaan itu tampak dalam kesediaannya untuk bekerja sama dengan golongan lain dalam mencapai tujuan Masyumi. Kerja sama ini pada awalnya dilakukan secara luas dan tanpa batas, sehingga di zaman revolusi itu pun Masyumi bersedia juga bekerja sama dengan golongan Komunis beraliran Trotskyis di bawah pimpinan Tan Malaka.<sup>10</sup>

Kerja sama Masyumi dengan PKI, yaitu Komunis beraliran Stalinis di bawah kepemimpinan Muso, sedikit sekali. Pada waktu sekelompok orang PKI mencoba untuk merebut kekuasaan, yang dimulai dari Madiun pada 18 September 1948, para pemimpinnya mendesak rakyat untuk menentang "Kabinet Masyumi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta." Kaum Komunis menuduh bahwa Hatta dan tokoh-tokoh Masyumi adalah "borjuis" dan "antek imperialis Amerika". Menurut tokoh-tokoh Komunis, berharap kepada "kemurahan hati Amerika" dalam menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda adalah "harapan sia-sia", karena Amerika Serikat juga "imperialis". Satu-satunya jalan yang mungkin bagi Indonesia untuk menang melawan Belanda adalah "jika Indonesia bersekutu dengan Uni Soviet". Negara Komunis ini, menurut Muso telah jelas "anti-imperialisme dan kolonialisme".<sup>11</sup>

Perang pamflet dan perkelahian antara pendukung Masyumi dan pendukung FDR (Front Demokrasi Rakyat)<sup>12</sup> yang beraliran Komunis dan dipimpin oleh Muso itu menjadi sengit setelah Agustus 1948. Akhirnya meletuslah "Pemberontakan Komunis di Madiun" pada 18 September 1948. Bendera Indonesia (merah putih) diturunkan dan digantikan dengan bendera merah "palu arit". Dalam pemberontakan itu beribu-ribu rakyat, polisi dan pasukan

<sup>9</sup> Anggota asli Masyumi adalah NU, Muhammadiyah, PUI dan Perikatan Umat Islam. Dua organisasi yang disebutkan terakhir ini kemudian bergabung menjadi satu organisasi PUSI (Persatuan Umat Islam Indonesia). Persis, PUSA, dan Al-Jam'iyatul Washliyah, menjadi anggota istimewa pada tahun 1949. Al-Ittihadiyah pada tahun 1951. Pada akhirnya, NU keluar sebagai anggota istimewa Masyumi dan menjadikan dirinya sebagai partai politik Islam baru pada tahun 1952, mengikuti jejak Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) yang keluar sebelumnya pada bulan Juli 1947, sebagai akibat tidak puas dengan dominasi kaum modernis di dalam kepemimpinan Masyumi. Lihat Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*, hal. 183-184; dan Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, hal. 115.

<sup>10</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*, hal. 82.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 82-83. Lihat pula uraian menarik tentang Muso dan Front Demokrasi Rakyat (FDR) dalam Pemberontakan Madiun itu sebagai reaksi terhadap Kabinet Hatta dan Masyumi, dalam Soe Hok Gie, 1997, *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, hal. 161-231

<sup>12</sup> Deliar Noer, 1987, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 184. FDR ini terutama didukung oleh organisasi politik Sayap Kiri, antara lain Partai Sosialis Indonesia (Parsi-Amir Sjarifuddin), Partai Buruh, dan PKI. Lihat, Soe Hok Gie, *Orang-Orang di Persimpangan Kiri*, hal. 215.

yang anti Komunis mati terbunuh.<sup>13</sup> Begitu juga banyak orang yang mendukung komunis ikut terbunuh.

Masyumi mengutuk keras pemberontakan FDR, dan menuduh kaum Komunis sebagai “pengkhianat terhadap bangsa dan negara”. Sejak peristiwa itu pula, Masyumi mulai mengganti sikapnya dalam bekerja sama dengan kaum Komunis ke arah yang sangat *rigid*. Ada yang berdalih bahwa bekerja sama dengan “kaum anti-Tuhan, anti agama, dan anti demokrasi” tidak boleh dilakukan untuk selama-lamanya.<sup>14</sup> Sikap-sikap permusuhan antara Masyumi dan kaum Komunis, yang kemudian ditujukan secara langsung kepada PKI, berlanjut hingga Masyumi itu terpaksa membubarkan diri pada tahun 1960.<sup>15</sup> Sikap permusuhan Masyumi terhadap PKI antara lain ditujukan pada sikap politik PKI yang dianggap telah “menghalalkan segala cara”, dan prinsip-prinsip Komunisme yang dianut PKI berlawanan secara diametral dengan prinsip-prinsip keagamaan yang dianut Masyumi. Pernyataan bahwa PKI pada 1954 menerima Pancasila sebagai dasar negara, bagi Masyumi merupakan sesuatu hal yang aneh dan tidak mungkin sepenuh hati, karena Komunisme pada dasarnya tidak mengakui adanya Tuhan.

Dari uraian di atas, tulisan ini bermaksud; (1) mengeksplorasi latar ideologis pembentukan Masyumi; (2) gagasan-gagasan pokok wacana ideologi Masyumi tentang Komunisme; dan, (3) implikasi wacana ideologi Masyumi terhadap faksi-faksi di tubuh Masyumi dalam menyikapi bahaya komunisme.

### *B. Latar Ideologis Pembentukan Masyumi*

Cara pandang terhadap sejarah sebuah gerakan, baik bersifat sosial, pendidikan, maupun politik, dengan melihat motif atau tujuan dan latar kondisi sosio-ideologi-politis gerakan tersebut adalah sangat penting. Dengan begitu, maka akan diketahui secara jelas bagaimana paradigma, asumsi nilai, pemikiran, dan ideologi untuk mencapai tujuan gerakan tersebut dibangun oleh para tokoh pendiri atau pengambil inisiatif.

Sejarah pembentukan Masyumi pun tidak terlepas dari motif dan faktor-faktor yang melatarinya. Suasana revolusi dan persaingan berbagai kelompok ideologi di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, serta peran tokoh-tokoh ideologi yang mengambil inisiatif turut mewarnai pembentukan Masyumi. “Partai Politik Islam Indonesia Masyumi” didirikan dan diikrarkan sebagai satu-satunya partai politik Islam pada 7 November 1945 berdasarkan keputusan

<sup>13</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*, hal. 83-84;

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 84.

<sup>15</sup> Deliar Noer, *Partai Islam*, hal. 184. Perintah resmi pembubaran Masyumi (dan Partai Sosialis Indonesia/PSI-Sjahrir) menurut Keputusan Presiden No. 200/1960, pada 19 Agustus 1960, terutama karena keterlibatan beberapa tokoh penting Masyumi dan PSI dalam pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera Barat mulai Februari 1958. Lihat pula Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, hal.187-192.

Kongres Umat Islam di Yogyakarta yang diselenggarakan 7-8 November 1945, bertepatan 1-2 Dzulhijjah 1364 H. Inisiatif pembentukan Masyumi berasal dari sejumlah tokoh partai politik dan gerakan sosial keagamaan Islam sejak zaman pergerakan,<sup>16</sup> seperti Agoes Salim, Professor Abdul Kahar Muzakkir, Abdul Wahid Hasjim, Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Ki Bagus Hadikusumo, Mohammad Mawardi, dan Dr. Abu Hanifah.<sup>17</sup> Organisasi-organisasi para tokoh itu, ada yang meleburkan diri atau kemudian menjadi penopang utama sebagai anggota istimewa Masyumi.<sup>18</sup>

Keputusan membentuk Masyumi oleh sejumlah tokoh Islam itu, tidak sekadar sebagai keputusan tokoh-tokoh tersebut, tetapi keputusan dari "seluruh umat Islam Indonesia" melalui utusan wakil-wakil mereka.<sup>19</sup> Penilaian ini adalah beralasan apabila Masyumi dilihat dari susunan kepengurusannya, yang mencerminkan wakil-wakil sejumlah partai politik dan gerakan sosial keagamaan Islam. Keterwakilan tokoh-tokoh berbagai organisasi Islam di Masyumi, mencerminkan sifat pluralisme sebagai "partai tunggal Islam" yang menghimpun semua potensi kekuatan politik Islam. Motif itu, menurut Yusril Ihza Mahendra, didorong oleh pandangan-pandangan dasar modernisme yang positif dan optimis memandang pluralisme.<sup>20</sup> Perbedaan dipandang sebagai "rahmat" dari Tuhan, karena perbedaan itu "tidak bersifat fundamental", tetapi hanya berhubungan dengan masalah-masalah *furāiyah* (perkara-perkara kecil).<sup>21</sup> Tidaklah mengherankan, apabila pada akhirnya tokoh-tokoh tersebut mengambil inisiatif dalam pembentukan Masyumi guna menyatukan golongan-golongan Islam ke dalam satu partai politik yang kuat.<sup>22</sup>

Perkara-perkara besar yang dipandang sangat perlu dan mendesak difakukan menurut para pembentuk Masyumi adalah menyikapi suasana "revolusi Indonesia" dan persaingan antara berbagai kelompok ideologi politik dalam

<sup>16</sup> Partai-partai politik zaman pergerakan yang ikut serta para wakilnya seperti PSII, Partai Islam Indonesia (PII), Penyedat; sedangkan organisasi sosial keagamaan yaitu NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), PUI, PUIH, dan sebagainya. Pada perkembangan berikutnya PSII keluar dari Masyumi pada 1947, menyusul NU pada 1952. Sekalipun begitu ada pula yang ikut meleburkan diri ke dalam Masyumi seperti Partai "SERMI" (di Banjarmasin), Partai "USUMI" (di Samarinda), Al-Jamiyatul Wasliyah (di Medan), "Nurul Islam (di Tanjung Pandan), dan "Permi" (di Pontianak) pada 1950. Lihat, Taufiqurrahman, "Peringatan Ulang Tahun Ke V Partai Politik Islam 'Masyumi'", *Suara Partai Masyumi*, 1950, No. 11, Th. 5, Desember, hal. 10; Amanat Prawoto Mangkusasmito, "Dalam Memperingati 6 Tahun Masyumi", *Hikmah*, 1951, No. 9 Th. IV, 4 November, hal. 6 dan penulis yang sama dalam "Amanat Wakil Ketua Pimpinan Partai Dalam Ulang Tahun Ke VI Masyumi", *Suara Partai Masyumi*, 1951, No. 11/12, Th. Ke-6, November-Desember, hal. 4; "Partai Masyumi" dalam *Kepartaian di Indonesia*, 1950, Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, hal. 9.

<sup>17</sup> Yusril Ihza Mahendra, 1999, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jam'at-i-Islam (Pakistan)*, Penerbit Paramadina, Jakarta, hal. 62-63.

<sup>18</sup> Pembahasan ini bisa dilihat dalam Tamar Djaja, 1952, "Masyumi dengan Anggota Istimewa dan Otonom", *Suara Partai Masyumi*, No. 2, Th. Ke-7, Februari, hal. 27-28.

<sup>19</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*, hal. 64.

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 65

<sup>21</sup> Mohammad Natsir dalam *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

masyarakat Indonesia.<sup>23</sup> Suasana revolusi dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Suasana ini tampak mempengaruhi rumusan tujuan dan urgensi program Masyumi yang kelihatan sangat patriotik dan nasionalistik. Tujuan Masyumi pada Kongres Umat Islam itu adalah "Menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan Agama Islam," dengan senantiasa "Melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan."<sup>24</sup>

Penjajahan yang dialami bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, telah membawa penderitaan yang sangat berat. Kolonialis Belanda bersama Inggris yang datang seusai proklamasi kemerdekaan Indonesia, telah melakukan "provokasi-provokasi yang senantiasa diarahkan kepada daulat kekuasaan Republik Indonesia dan kemerdekaan bangsa dan Agama."<sup>25</sup> Menurut Keputusan Mukhtar Pertama Masyumi di Solo pada 1946, upaya imperialisme Belanda untuk menjajah kembali Indonesia, telah "memaksa... Umat Islam berjuang dalam cara Sabilillah, yakni meninggikan Kalimah Allah yang sedang direndah-hinakan dalam pergaulan waktu [revolusi] ini."<sup>26</sup> Bagaimanapun, "Umat Islam di bawah pimpinan Masyumi... telah bulat niat dan tekadnya untuk tetap memiliki negara yang merdeka 100% dan oleh karenanya tidak akan menerima putusan dari siapapun juga yang tak dapat mencukupi tujuan Masyumi..."<sup>27</sup> Usaha Masyumi untuk mewujudkan tekad tersebut ialah, pertama, dengan "peperangan kemerdekaan". Kedua, ikut dalam proses penyusunan pemerintahan yaitu anggota Masyumi terlibat di kabinet, parlemen dan jabatan-jabatan administrasi pemerintahan. Ketiga, "perjuangan diplomasi" di meja perundingan hingga dicapai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 7 Desember 1949.<sup>28</sup>

Pada usaha pertama, telah dibentuk "Barisan Hizbullah bagi para pemuda Islam dan Sabilillah bagi segenap Muslimin dan Muslimat."<sup>29</sup> Terhadap usaha kedua, Masyumi mendukung perjuangan demokrasi untuk "...mewujudkan susunan negara yang berdasarkan kedaulatan Rakyat dan masyarakat berdasar keadilan menurut ajaran-ajaran Islam..." Perwujudan kedaulatan rakyat itu ditandai dengan "...adanya hak memilih dan dipilih yang umum dan langsung."<sup>30</sup> Usaha ketiga, selain untuk mendapat pengakuan internasional atas kedaulatan Republik Indonesia, Masyumi juga berupaya agar pemerintah

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 66.

<sup>24</sup> Lihat Anggaran Dasar Pasal II "Partai Masyumi" dalam *Kepercayaan di Indonesia*, hal. 10; dan Prawoto Mangkusasmito, "Dalam Memperingati 6 Tahun Masyumi", hal. 6.

<sup>25</sup> "Dokumentasi Masyumi", 1956 dalam *Muktamar Masyumi Ke-VIII 22-29 Desember*, Panitia Muktamar Masyumi, Bandung VIII, 1956), hal. 28.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 29.

<sup>28</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*, hal. 66, dan 78-81

<sup>29</sup> Taufiqurrahman, "Peringatan Ulang Tahun Ke V", hal. 9; Abu Barkat, "Peristiwa Penting", hal. 16

<sup>30</sup> "Dokumentasi Masyumi", hal. 29-30.

Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas-aktif.<sup>31</sup> Sikap politik luar negeri Masyumi dipertegas oleh *Manifest Politik 1947*, bahwa Masyumi "...Berusaha supaya politik Umat Islam Indonesia dapat menempatkan Negara Republik Indonesia ... berdampingan dengan negara-negara Demokrasi, terutama yang berkuasa atau berpengaruh di Pasifik, dan menentang politik yang mungkin dapat merugikan haluan politik itu...."<sup>32</sup>

Proses membentuk dan mempertahankan kedaulatan negara baru dalam suasana revolusi telah menimbulkan pertarungan kepentingan dari berbagai kelompok yang saling ber-saing memperebutkan kekuasaan dan pengaruh. Persaingan ini pada gilirannya melibatkan perta-rungan kelom-pok ideologi utama, yang telah lama tumbuh sejak awal zaman pergerakan yaitu kelompok Islam, Nasionalisme Sekular dan Komunisme.<sup>33</sup>

Persaingan aliran ideologi politik mendapatkan ruang geraknya, terutama setelah Maklumat Pemerintah yang ditandatangani Wakil Presiden Republik Indonesia Mohammad Hatta, pada 3 November 1945, tentang pembentukan partai-partai di Indonesia. Melalui maklumat itulah lahir partai-partai politik yang mewakili aliran-aliran ideologi-politik yang tumbuh di masyarakat.<sup>34</sup> Bahaya persaingan ideologi politik ini dirasakan pula oleh Masyumi, sehingga dalam *Manifest Politik 1947* ditegaskan perlu "... (2.) Menambah tersebarnya ideologi Islam di kalangan masyarakat Indonesia, dengan tidak menghalangi fihak lain yang sejalan memperkokoh sendi ke-Tuhanan Yang Maha Esa. (3.) Membentengi jiwa Umat Islam dari infiltrasi ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Agama Islam dengan tekad fi-Sabilillah."<sup>35</sup>

Latar ideologis Masyumi juga dipengaruhi oleh suasana internasional pasca-Perang Dunia II, yang pada gilirannya melahirkan bentuk perang baru berupa "Perang Ideologi" yang kemudian dikenal dengan sebutan "Perang Dingin". Perang ini melibatkan dua kubu ideologi pemenang Perang Dunia II, yaitu Blok Barat yang terdiri atas Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat memperjuangkan Kapitalisme, sedangkan Blok Timur yang terdiri atas Uni Soviet beserta negara-negara Eropa Timur memperjuangkan komunisme.<sup>36</sup>

Pertarungan dua kubu ideologi ini juga memiliki pengaruh terhadap keberpihakan politik internasional partai-partai politik di Indonesia masa revolusi tersebut. Bagi Masyumi, sebagaimana diulas di atas, lebih memilih

<sup>31</sup> Kebijakan politik luar negeri Masyumi ditegaskan berulang-ulang terutama dalam setiap keputusan Muktamar sejak Muktamar I. Februari 1946.

<sup>32</sup> "Dokumentasi Masyumi", hal. 29-30.

<sup>33</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*, hal. 67.

<sup>34</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, PT Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta, 1985. I: 55-56; George McTurnan Kahin, 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, hal. 156-161.

<sup>35</sup> "Dokumentasi Masyumi", hal. 33-34; Abu Barkat, "Peristiwa Penting", hal. 16.

<sup>36</sup> Fred Haliday, 1993, "Cold War" dalam Joel Krieger (ed.), *The Oxford Companion to Politics of the World*, Oxford University Press, New York dan Oxford, hal. 151-153.



politik luar negeri bebas-aktif untuk tidak terikat dan memihak kepada salah satu dari kedua blok Perang Dingin. Menurut pernyataan Abu Hanifah, salah seorang anggota DPP Masyumi, dalam Mukhtamar V Masyumi di Jakarta pada 7-31 Januari 1951, bahwa "(8). — Politik bebas Indonesia, berarti mengalirkan politik luar negeri dengan aktif dan sadar kepada politik damai di dunia dan politik damai terhadap segala bangsa dan negara di Indonesia."<sup>37</sup> Politik luar negeri ini juga mensyaratkan adanya pengakuan internasional terhadap kedaulatan Republik Indonesia sebagai sebuah negara baru merdeka, sehingga terbina kerja sama di lapangan internasional untuk menciptakan kemakmuran, keadilan dan perdamaian dunia, terutama dengan negara-negara Islam.<sup>38</sup> Dengan demikian, kondisi itu dapat terwujud apabila terdapat "kedudukan sama harga (sederajat) di antara bangsa-bangsa merdeka lainnya dalam pergaulan internasional."<sup>39</sup>

### C. Islam di antara Kapitalisme dan Komunisme

Pilihan Islam sebagai ideologi Partai Masyumi adalah sejalan dengan latar pembentukan Masyumi itu sendiri, sebagaimana telah diuraikan di muka. Cita Islam sebagai ideologi Masyumi tampak dari rumusan tujuan pertama kali yang diputuskan Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta, 7-8 November 1945, yaitu: "Pasal II. [1.] Menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan Agama Islam. [2.] Melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan."<sup>40</sup>

Tujuan Masyumi tersebut tampak didasari oleh pemikiran bahwa di dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan agama dengan urusan politik (negara).<sup>41</sup> Dengan demikian, "menegakkan Islam tak dapat dilepaskan dari menegakkan masyarakat, menegakkan negara, menegakkan kemerdekaan."<sup>42</sup> Pemisahan antara agama dengan politik mungkin tepat bagi agama-agama lain di luar Islam, terutama pada agama Kristen (Katolik) yang mengenal teori "*caesaro-papisme*".<sup>43</sup> Bagi Mohammad Isa Anshary, salah satu tokoh penting di Masyumi, pemikiran politik sekuler ini merupakan warisan "*cultural imperialism*" yang dibawa oleh agen imperialis, yaitu kelompok "aliran kafir" (yang menolak kebenaran dan kenyataan agama), "aliran netral" yaitu kelompok paham nasionalisme (yang tidak mempedulikan agama) dan "aliran munafik" (yang lebih berbahaya daripada "aliran kafir").<sup>44</sup>

<sup>37</sup> Abu Hanifah, 1951, "Politik Luar Negeri", *Suara Partai Masyumi*, No. 2 Th. Ke-6, Februari, hal. 18.

<sup>38</sup> "Dokumentasi Masyumi", hal. 29.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Kepartaian di Indonesia*, hal. 10

<sup>41</sup> Mohammad Natsir, 1950, *Islam sebagai Ideologi*, cet. ke-2, : Penerbit Aida, Jakarta, hal. 14.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 25.

<sup>44</sup> M. Isa Anshary, 1953, "Garis Pokok Perjuangan Masyumi (I)", *Suara Partai Masyumi*, No. 3, Th. VIII, Maret, hal. 18-19.